

## BAB V

### KESIMPULAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh. Setelah melakukan pengkajian terhadap permasalahan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

*Pertama*, Militer Indonesia mempunyai keunikan dikarenakan mempunyai peran diluar masalah pertahanan dan keamanan. Seperti, peran sosial, politik maupun ekonomi, hal ini dikarenakan faktor internal terkait dengan faktor sejarah dan persepsi kompetensi serta faktor eksternal terkait dengan kemampuan elit sipil dalam mengelola bangsa khususnya masalah pertahanan serta seringnya konflik elit sipil yang diperepsikan militer dapat mengganggu dan membahayakan negara. Militer Indonesia sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan telah muncul sebagai kekuatan politik yang sampai batas tertentu telah ikut terlibat dalam penyusunan strategi pendirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perjalanan sejarah Indonesia tidak terlepas dari peran-peran dan kebijakan-kebijakan militer yang memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan selanjutnya. Masuknya militer ke dalam ranah politik Indonesia memberikan dampak buruk bagi kelangsungan kekuatan-kekuatan politik lainnya seperti halnya partai politik. Partai politik menganggap bahwa masuknya militer dalam ranah politik memperlemah sistem politik yang sedang dibangun saat itu. Namun keterlibatan militer dalam bidang politik, karena dihadapkan pada kondisi nyata yang mengharuskannya ikut masuk di dalamnya.

Goncangan yang begitu hebat melanda sistem politik demokrasi parlementer berbarengan dengan meluasnya krisis politik dan melemahnya partai-partai politik sebagai pendukung utama sistem itu. Soekarno, militer (Angkatan Darat) di bawah Nasution dan PKI telah muncul sebagai kekuatan yang paling berpengaruh dalam pentas politik nasional, dan lebih dari itu pertentangan dari kekuatan-kekuatan tersebut sering muncul ke permukaan. Nasution sebagai seorang militer yang telah membela kepentingan-kepentingan tentara selama lebih dari 20 tahun, mempertimbangkan kepentingan-kepentingan korporat militer. Sejak awal sikap politiknya menolak partisipasi PKI dalam pemerintahan. Bukan saja ia menolak komunisme itu sendiri atau karena tentara dan PKI telah berada dalam pihak yang berseberangan pada tahun 1948, tetapi yang lebih penting dari itu ia tidak rela dengan usaha-usaha yang dijalankan PKI untuk menanamkan ideologi komunis atas nama Nasakom di tubuh tentara.

*Kedua*, latar belakang kehidupan dan karir militer telah membawa Nasution menjadi seorang tokoh militer yang penuh dengan keteguhan hati memperjuangkan militer yang tidak hanya berperan sebagai alat keamanan dan pertahanan, namun sekaligus ikut terlibat dalam ranah politik negara. Keteguhan Nasution terhadap prinsip-prinsip mendasar yang diyakininya, dan perkembangan pemikirannya, serta ketajaman intuisinya membaca perkembangan politik yang terjadi, mendorongnya untuk berupaya keras dalam mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi dasar hukum partisipasi politik militer yang tidak permanen. Langkah-langkah tersebut menuntut dirumuskannya sebuah konsep politik militer yang matang dan dapat diterima. Hal tersebut memberikan pembenaran hukum paling kuat bagi partisipasi politik yang luas dari kelompok

militer. Upaya semacam itu semakin dipercepat ketika Nasution menyadari bahwa walau bagaimanapun diperlukan tindakan-tindakan kongkrit untuk menghadapi tuduhan dari partai-partai politik bahwa militer tengah bergerak untuk mendominasi kekuasaan politik. Suatu rumusan politik yang secara sah diterima oleh semua kekuatan politik, sekaligus juga dapat dimaksudkan untuk meredakan tuntutan dari kalangan-kalangan perwira-perwira radikal yang menginginkan suatu tingkat keterlibatan politik yang lebih jauh lagi. Dwifungsi TNI merupakan salah satu pemikiran Nasution mengenai partisipasi militer dalam ranah politik di Indonesia. Nasution menganggap bahwa militer berhak berpartisipasi dalam pembangunan negara, karena berkaitan dengan proses kelahiran militer yang berbeda dengan negara lain. Langkah selanjutnya mengkonsolidasikan TNI membentuk suatu kekuatan membendung pengaruh-pengaruh PKI di pemerintahan. Meletusnya peristiwa G30S/PKI memberi dampak besar bagi perkembangan politik di Indonesia.

*Ketiga*, Nasution sebagai perwira senior dengan pangkat paling tinggi di Angkatan Darat, ia tetap menduduki posisi terhormat dan berpengaruh. Nasution memanfaatkan posisinya itu untuk menghancurkan lawan politiknya yang paling gigih yaitu PKI, dan mungkin secara sadar juga menghancurkan tatanan politik Demokrasi Terpimpin yang dibangun Soekarno melalui ajaran Nasakom. Melalui jabatan barunya sebagai ketua MPRS, ia memulai aksinya dengan membersihkan MPRS dari unsur PKI. Kemudian ia terus mengusahakan pembubaran PKI dan menuntut Presiden Soekarno memberi penjelasan mengenai peristiwa G30S. Ia tahu Soekarno akan terpojok oleh persoalan itu. Walaupun ia tidak berniat menurunkan Soekarno dari kedudukannya sebagai presiden, tetapi Nasution

secara tidak langsung telah membuat Soekarno kehilangan kedudukan sakralnya yang selama ini diyakininya tidak dapat diganggu gugat, termasuk oleh badan yang menurut UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi yaitu MPRS. Nasution mungkin juga sadar bahwa meminta Soekarno membubarkan PKI sama saja dengan menantanginya untuk menghancurkan ajarannya sendiri yaitu Nasakom. Dalam hal ini secara tidak langsung Nasution memberi pilihan kepada Soekarno tetap berkuasa dengan menghapus ide yang tidak realistis tentang Nasakom dari Indonesia, atau kehilangan kekuasaan sama sekali. Soekarno kemudian memilih untuk tidak berkuasa daripada mengkhianati keyakinannya.

*Keempat*, Peran paling menentukan dalam peralihan kekuasaan adalah mengantarkan Soeharto yang berasal dari golongan militer ke puncak kekuasaan. Perannya di sini bukan hanya sebagai ketua MPRS yang memantapkan kedudukan Soeharto sebagai pejabat Presiden, tetapi ia juga seorang perwira senior militer yang sarat pemikiran. Ia mempertaruhkan pemikiran, kewibawaan dan reputasi yang telah dibangunnya lebih dari dua puluh tahun yang lalu untuk mengantarkan militer ke puncak kekuasaan di bawah pemerintahan Soeharto yang kelak bertahan lebih dari 30 tahun.

Sementara itu perhatiannya yang besar terhadap masalah ekonomi dan kenyataan bahwa Soekarno telah mengabaikan hal tersebut selama berlangsungnya Demokrasi Terpimpin sangat mengecewakannya. Kecenderungannya untuk menggariskan segala sesuatu berdasarkan UUD 1945, mencuatkan beberapa hal penting yang membuat Nasution yakin akan kebenaran tindakannya untuk mengakhiri kekuasaan Soekarno. *Pertama*, bahwa Soekarno secara sepihak telah menetapkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara

berdasarkan kehendaknya sendiri yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan karenanya dipertanyakan legalitasnya. *Kedua*, selama periode Demokrasi dipimpin Soekarno mengabaikan masalah ekonomi yang dalam pandangan Nasution justru mendesak untuk ditanggulangi. Walaupun militer bukanlah lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks pada saat itu, tetapi sampai pada batas tertentu keyakinannya adalah bahwa militer dapat menciptakan keadaan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi sambil berupaya melakukan hal yang serupa bagi pemberlakuan UUD 1945 secara murni.

Pemikiran Nasution untuk menjadikan pemerintahan tahun 1967 ditangan Soeharto sebagai pemerintahan transisi tampaknya tidak menarik bagi sebagian besar perwira militer. Apalagi pada tahun 1967 Nasution tidak memiliki jabatan dan wewenang apapun dalam kemiliteran, yang menjadikan pemikirannya tidak harus menjadi sikap politik tentara sebagaimana ketika ia menjabat sebagai KSAD.